



DIGITALISASI KOPERASI PEDESAAN SEBAGAI PENDORONG EKONOMI INKLUSIF: ANALISIS KESENJANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITAL ANTARA WILAYAH PERKOTAAN DAN PEDESAAN

Bondan Wicaksono¹, Hwihanus²

¹STIE Unisadhuguna, Jakarta, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email : bondan.wicaksono@ubs-usg.ac.id
hwihanus@untag-sby.ac.id

Diterima: 30/5/2026; Direvisi: 10/6/2026; Diterbitkan: 18/6/2026

ABSTRACT

Digitalisasi koperasi menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan Roadmap Digitalisasi Koperasi 2021–2024. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi kesenjangan spasial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review untuk menganalisis 28 artikel terindeks Scopus dan dokumen kebijakan resmi periode 2020–2025. Temuan menunjukkan bahwa penetrasi digitalisasi koperasi terkonsentrasi di wilayah Jawa dengan capaian jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Timur; tiga bottleneck utama menghambat transformasi di pedesaan: kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi pada kelompok usia lanjut, dan ketidaksesuaian desain platform dengan praktik ekonomi lokal berbasis gotong royong. Model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, dan penyedia teknologi lokal terbukti meningkatkan keberlanjutan adopsi teknologi sebagaimana terdokumentasi dalam studi kualitatif terkini. Penelitian merekomendasikan integrasi kebijakan digitalisasi koperasi dengan program Penguatan Desa melalui pendampingan berbasis komunitas dan pengembangan platform yang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal.

Keywords: *Koperasi Pedesaan; Digitalisasi; Ekonomi Inklusif; Tata Kelola Kolaboratif; Indonesia Emas 2045*

ABSTRAK

Digitalisasi koperasi menjadi salah satu strategi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 dan Roadmap Digitalisasi Koperasi 2021–2024. Namun, penerapan kebijakan ini mengatasi gangguan spasial yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis untuk menganalisis 28 artikel terindeks Scopus dan dokumen kebijakan resmi periode 2020–2025. Temuan menunjukkan bahwa penetrasi digitalisasi koperasi ditampilkan di wilayah Jawa dengan capaian jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Timur; Tiga hambatan utama menghambat transformasi di kekacauan: kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi pada kelompok usia lanjut, dan ketidaksesuaian desain platform dengan praktik ekonomi lokal berbasis gotong royong. Model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, dan penyedia teknologi lokal



terbukti meningkatkan adopsi teknologi sebagaimana terdokumentasi dalam studi kualitatif terkini. Penelitian merekomendasikan integrasi kebijakan digitalisasi koperasi dengan program Penguatan Desa melalui pendampingan berbasis komunitas dan platform pengembangan yang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal.

Kata Kunci: *Koperasi Pedesaan; Digitalisasi; Ekonomi Inklusif; Tata Kelola Kolaboratif; Indonesia Emas 2045*

PENDAHULUAN

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi transformasi pembangunan nasional yang inklusif, merata, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Dalam kerangka tersebut, koperasi bertindak sebagai wujud nyata ekonomi Pancasila yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 untuk memicu perluasan kesejahteraan publik. Lembaga ini diidealkan mampu menjadi penggerak utama modernisasi finansial di wilayah pedesaan guna mengatasi hambatan keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal yang kaku. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pedesaan belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal, sehingga memosisikan koperasi sebagai institusi keuangan mikro yang sangat krusial dalam ekosistem ekonomi lokal. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi daerah, memperkuat daya beli masyarakat bawah, serta menekan angka kemiskinan struktural. Oleh karena itu, penataan sistem tata kelola keuangan mikro di pedesaan harus diposisikan sebagai pilar penggerak utama dalam rencana strategis pembangunan nasional demi mencetak tatanan pasar domestik yang kokoh, tangguh, responsif, produktif, dan kebal terhadap berbagai guncangan krisis moneter global di masa depan.

Transformasi digital menjadi strategi utama pemerintah untuk memperkuat peran intermediasi finansial lembaga ini sebagaimana tertuang dalam *roadmap* digitalisasi koperasi 2021–2024 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Dokumen perencanaan tersebut secara ambisius menargetkan adanya peningkatan efisiensi operasional, transparansi laporan kas, keamanan transaksi, serta perluasan jangkauan pasar melalui adopsi teknologi berbasis komputasi awan. Kondisi yang diidealkan mengamanatkan bahwa seluruh pengelola koperasi di wilayah pedesaan harus memiliki kesiapan infrastruktur gawai dan literasi digital yang mumpuni untuk mengoperasikan perangkat lunak akuntansi modern. Integrasi sistem siber ini diproyeksikan dapat mengeliminasi risiko kesalahan pencatatan manual, mempercepat proses pengambilan keputusan taktis, serta meningkatkan kepercayaan para anggota terhadap akuntabilitas internal lembaga. Dengan terpenuhinya standardisasi operasional berbasis digital yang merata, koperasi pedesaan diharapkan mampu berdiri sejajar dengan institusi perbankan komersial dalam memfasilitasi kebutuhan permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga mampu mempercepat perwujudan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, dinamis, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.

Namun, realitas objektif yang senyatanya terjadi di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup lebar dan memprihatinkan antara ekspektasi regulasi tersebut dengan praktik operasional di dunia nyata. Capaian implementasi teknologi informasi senyatanya tidak merata secara geografis, di mana wilayah Jawa menunjukkan penetrasi digitalisasi yang signifikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Kesenjangan spasial ini mencerminkan sebuah paradoks nyata dalam pelaksanaan kebijakan makro di tingkat akar rumput. Di satu sisi terdapat



komitmen politik yang sangat kuat melalui RPJMN 2020–2024, namun di sisi lain realitas di tingkat desa menunjukkan adanya hambatan struktural yang sangat kompleks. Hambatan tersebut meliputi belum meratanya jaringan internet cepat, keterbatasan anggaran pengadaan peranti lunak, serta tingginya angka gagap teknologi di kalangan pengurus senior. Kesenjangan yang kontras ini menyebabkan tujuan utama digitalisasi gagal tercapai secara optimal di daerah luar Jawa, sehingga memicu kelesuan produktivitas dan memperlebar tingkat ketimpangan kesejahteraan antardaerah di Indonesia.

Sebab munculnya ketimpangan yang mencolok tersebut mengindikasikan adanya disorganisasi manajerial serta kebutuhan mendesak terhadap visualisasi model tata kelola digital yang adaptif bagi masyarakat agraris. Studi terdahulu yang disusun oleh Nurdany dkk. (2021) berhasil mengidentifikasi potensi besar digitalisasi dalam meningkatkan transparansi administrasi, namun sayangnya mereka masih minim dalam menganalisis aspek kesenjangan spasial antarwilayah secara komprehensif. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Bunders dkk. (2022) mengenai *platform cooperativism* cenderung bias pada konteks ekonomi *gig* perkotaan yang modern, sehingga belum menyentuh dinamika sosiologis koperasi pedesaan yang kental dengan nilai gotong royong dan musyawarah. Celah penelitian ini menjadi sangat relevan untuk segera dibedah karena keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada transformasi ekonomi di wilayah pedesaan yang menampung lebih dari 40 persen total populasi penduduk nasional (Badan Pusat Statistik, 2023). Tanpa adanya inovasi pengawasan yang terstruktur, investasi teknologi yang dikucurkan pemerintah akan berujung sia-sia dan mengancam keberlanjutan unit usaha desa.

Berangkat dari kompleksitas problematika tersebut, studi pustaka ini hadir dengan menawarkan nilai kebaruan berupa analisis evaluasi kebijakan yang mengkaji kesenjangan implementasi digitalisasi koperasi secara integratif. Riset teoretis ini dilaksanakan murni melalui penelusuran dokumen ilmiah dan sintesis data publik resmi tanpa melibatkan subjek penelitian lapangan maupun keterikatan lokasi sekolah tertentu, sehingga nama sekolah tidak dicantumkan. Inovasi dari penelitian konseptual ini terletak pada perancangan model tata kelola digital yang menyelaraskan nilai kearifan lokal gotong royong dengan sistem pengawasan siber terpadu guna mendeteksi faktor *bottleneck* utama di pedesaan. Riset ini berupaya menjawab tiga pertanyaan utama terkait pola sebaran spasial, hambatan struktural, serta keefektifan model tata kelola dalam meminimalkan deviasi kebijakan nasional. Hasil akhir dari penulisan artikel ilmiah ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi teoretis yang bermakna bagi khasanah ilmu kebijakan publik, serta menyediakan rekomendasi taktis yang aplikatif bagi pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif konseptual ini menerapkan pendekatan *systematic literature review* (SLR) yang mengacu pada protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* atau PRISMA. Desain ini dipilih secara sengaja untuk mengevaluasi kesenjangan spasial adopsi teknologi tanpa keterikatan lokasi sekolah, melainkan murni mengeksplorasi dokumen kebijakan makro (Page et al., 2021). Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang merancang kriteria seleksi data untuk menjamin objektivitas analisis regulasi. Sumber data sekunder diklasifikasikan ke dalam 2 rumpun utama, yakni literatur akademik internasional terindeks Scopus periode 2020–2025 serta dokumen publik resmi. Batasan kronologis ini digunakan sebagai prasyarat utama untuk menangkap dinamika tata kelola terbaru seputar transformasi ekonomi inklusif. Melalui standardisasi inklusi-eksklusi



yang ketat, seluruh artikel disaring secara transparan guna mengidentifikasi *bottleneck* struktural pada ekosistem pedesaan agraris tanpa melibatkan manipulasi variabel lapangan.

Proses penelusuran data sekunder diselesaikan secara bertahap dengan menggunakan instrumen berupa pedoman dokumentasi digital yang terstruktur. Pencarian awal melalui basis data siber menghasilkan 87 artikel, yang kemudian dievaluasi penuh hingga menyisakan 28 artikel ilmiah yang memenuhi syarat geografi tematik Indonesia (Page et al., 2021). Data kuantitatif pendukung organisasi disajikan dalam angka tekstual, seperti jumlah 3 hambatan utama dan 3 aktor kolaboratif desa. Teknik analisis data menggunakan metode *thematic synthesis* yang melingkupi alur *coding* tematik, integrasi statistik independen, dan analisis komparatif (Thomas & Harden, 2008). Proses reduksi data mengelompokkan transkrip dokumen ke dalam tema literasi gawai usia lanjut dan ketidaksesuaian nilai gotong royong. Uji keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dengan melakukan verifikasi silang data Kemenkop UKM terhadap publikasi BPS untuk menghasilkan simpulan yang kredibel dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesenjangan Spasial Implementasi Digitalisasi Koperasi Nasional

Penetrasi digitalisasi koperasi di Indonesia menunjukkan pola persebaran geografis yang tidak merata dan cenderung terpusat di wilayah barat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), wilayah Jawa mencatat capaian adopsi teknologi yang signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur. Perbedaan mencolok ini memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan ketimpangan tingkat kemajuan daerah yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun dari Badan Pusat Statistik (2023). Kabupaten dengan kategori desa mandiri menunjukkan kesiapan ekosistem teknologi yang jauh lebih matang untuk memodernisasi tata kelola administrasi keuangan mereka. Kondisi makro tersebut selaras dengan analisis mendalam dari World Bank (2021) yang menempatkan ketersediaan infrastruktur digital sebagai prasyarat utama inklusi keuangan komprehensif di pedesaan. Tanpa adanya pemerataan fasilitas jaringan, upaya mempercepat transformasi digital pada tingkat akar rumput akan selalu membentur dinding ketimpangan wilayah yang kronis. Oleh karena itu, pemetaan wilayah prioritas intervensi menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan pemerintah guna meminimalkan perluasan jurang pemisahan digital antardaerah.

Kompleksitas kesenjangan spasial ini tidak hanya mewujud dalam bentuk keterbatasan infrastruktur fisik, melainkan juga menyentuh dimensi kapasitas institusional kelembagaan. Koperasi yang beroperasi di wilayah tertinggal sering kali mengalami kelangkaan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan sistem informasi manajemen digital. Keterbatasan kapasitas manajerial ini terdokumentasi dengan sangat baik dalam studi kualitatif mendalam yang dilakukan oleh Suryono et al. (2021). Mereka menemukan bahwa pola rotasi kepemimpinan yang tidak mempertimbangkan kualifikasi literasi teknologi menjadi batu sandungan utama bagi keberlanjutan aplikasi operasional. Fenomena sosiologis tersebut menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi institusi ekonomi pedesaan tidak dapat dijamin semata-mata oleh pasokan perangkat keras dan jaringan internet. Diperlukan adanya penguatan kecakapan tata kelola lokal yang adaptif agar inovasi yang diperkenalkan dapat dipelihara secara mandiri dan berkelanjutan. Investasi pada aspek manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan fasilitas fisik agar efektivitas pemanfaatan dana investasi digital dapat dicapai secara optimal (Pelu et al., 2026; Sulistiarini et al., 2025).

Faktor Penghambat Utama Aksesibilitas Infrastruktur Digital Pedesaan



Analisis sintesis terhadap data lapangan berhasil mengidentifikasi tiga hambatan utama yang membekukan laju transformasi digital pada koperasi di pedesaan. Hambatan pertama yang paling mendasar adalah disparitas pemenuhan hak atas akses konektivitas internet pita lebar antarkawasan di Indonesia. Dokumentasi berkala dari Badan Pusat Statistik (2023) memperlihatkan adanya celah kualitas sinyal 4G/LTE yang sangat lebar antara desa di Jawa dan Papua. Ketimpangan telekomunikasi ini diperparah oleh belum meratanya pasokan aliran listrik stabil yang menjadi prasyarat utama operasionalisasi seluruh perangkat komputer. Bagi koperasi skala kecil di wilayah terluar, ketiadaan dua pilar utama ini membuat adopsi sistem aplikasi menjadi tidak layak. Hambatan teknis yang berbiaya tinggi ini menurunkan gairah pengurus untuk meninggalkan pola pembukuan konvensional yang dianggap lebih aman. Kondisi ini menuntut kehadiran regulasi afirmasi yang fokus pada pembangunan ruang digital di wilayah pinggiran demi menciptakan keadilan ekonomi yang merata (Hendrian, 2025; Koswara, 2024; Putra et al., 2023; Sulistiarini et al., 2025).

Selain masalah infrastruktur fisik, kendala kedua yang tidak kalah berat adalah rendahnya tingkat literasi digital pada kelompok usia lanjut. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (2023) mengonfirmasi bahwa proporsi anggota koperasi berusia di atas 45 tahun yang cakap mengoperasikan aplikasi keuangan masih sangat minim. Ironisnya, kelompok demografis senior ini justru mendominasi struktur keanggotaan koperasi pedesaan dan sering kali menduduki posisi strategis sebagai pengurus inti. Ketidaktahuan teknis dalam mengoperasikan ponsel pintar melahirkan resistensi psikologis yang kuat terhadap peralihan sistem kerja manual menuju platform digital. Mereka cenderung menganggap sistem baru sebagai ancaman mekanis yang merusak kebiasaan transaksi tatap muka yang penuh kehangatan sosial. Keengganan melepaskan kenyamanan buku kas tradisional ini memperlambat proses modernisasi internal organisasi dari dalam sistem itu sendiri. Diperlukan pendekatan edukasi yang persuasif dan penuh kesabaran untuk mengikis ketakutan metodologis yang dialami oleh para pengurus senior tersebut (Darmayanti & Maghfiroh, 2026; Haq & Abdullah, 2026; Ningsih, 2023).

Resistensi Sosio-Kultural Akibat Ketidakesesuaian Desain Platform Keuangan

Hambatan ketiga yang kerap luput dari perhatian para pengambil kebijakan adalah ketidakesesuaian desain platform digital dengan karakteristik budaya ekonomi lokal. Mayoritas aplikasi komersial yang beredar di pasar saat ini dikembangkan oleh teknokrat perkotaan yang minim pemahaman terhadap nilai sosiologis pedesaan. Studi kualitatif dari Suryono et al. (2024) mendokumentasikan penolakan masif anggota koperasi di Jawa Tengah terhadap penerapan sistem pemungutan suara elektronik. Teknologi tersebut dinilai mencederai nilai luhur musyawarah mufakat yang selama ini menjadi fondasi utama dalam ikatan gotong royong warga. Pemotongan proses interaksi sosial demi mengejar efisiensi waktu justru melahirkan kecurigaan dan merusak rasa saling percaya antaranggota. Temuan empiris ini memperkuat hipotesis akademis bahwa implementasi inovasi teknologi memerlukan metode perancangan bersama yang melibatkan komunitas lokal sejak awal. Pengembang perangkat lunak tidak boleh memaksakan standarisasi modern yang sekadar memindahkan sistem perkotaan ke dalam ekosistem desa yang sarat kearifan lokal (Jakobsen et al., 2023; Maharani & Indratno, 2025; Wiguna et al., 2025).

Ketidacocokan desain antarmuka aplikasi yang terlalu rumit juga sering kali membingungkan pengguna di pedesaan yang terbiasa dengan kesederhanaan operasional. Banyak platform yang menyajikan istilah finansial yang terlalu teknis dan menggunakan bahasa baku yang asing bagi telinga masyarakat petani. Akibatnya, tingkat kesalahan input data oleh



pengurus koperasi menjadi sangat tinggi, yang berujung pada kerugian finansial organisasi. Ketakutan akan hilangnya kendali atas simpanan anggota karena perpindahan data ke sistem komputasi awan memicu penolakan yang laten. Sentralisasi data pada server pihak ketiga sering kali dipersepsikan negatif sebagai bentuk hilangnya kedaulatan ekonomi mandiri koperasi. Oleh karena itu, aspek sosiokultural wajib diletakkan sebagai variabel utama dalam menyusun arsitektur teknologi yang humanis bagi pedesaan. Pendekatan teknologi yang mengabaikan sensitivitas budaya lokal dipastikan akan berakhir sebagai proyek gagal yang mubazir dan ditinggalkan oleh penggunanya.

Formulasi Model Tata Kelola Kolaboratif Berbasis Kearifan Lokal

Menghadapi kompleksitas hambatan yang ada, studi kualitatif terkini mulai mengarah pada dokumentasi keberhasilan implementasi model tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini menawarkan solusi integratif dengan menyinergikan tiga aktor utama yang bergerak secara harmonis dalam ekosistem pedesaan. Aktor pertama adalah pemerintah desa yang bertindak sebagai penyedia fasilitas ruang pelatihan digital terpadu serta penyokong dana stimulan. Koperasi berperan sebagai aktor kedua yang bertugas mengadaptasi platform teknologi dengan tetap memelihara institusi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Aktor ketiga adalah penyedia teknologi lokal yang memiliki kepekaan untuk memodifikasi antarmuka sistem menggunakan bahasa daerah yang inklusif. Desain aplikasi sengaja dikonversikan agar kompatibel dengan sistem ekonomi tradisional masyarakat pedesaan seperti pengelolaan dana arisan warga. Sinergi tripartit ini terbukti mampu mengikis kecurigaan kultural dan mempercepat penerimaan teknologi secara masif pada tingkat akar rumput (Damayanti et al., 2026; Devi et al., 2021; Manawar et al., 2023; Nova & González, 2022).

Keberhasilan integrasi ini juga didorong oleh adanya pembagian peran yang adil dan transparan di antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah desa memberikan jaminan legalitas dan perlindungan siber awal, sementara koperasi memastikan bahwa nilai kemandirian ekonomi tidak tergadaikan. Penyedia teknologi lokal tidak memosisikan diri sebagai vendor komersial murni, melainkan sebagai mitra strategis yang ikut bertanggung jawab moral. Model tata kelola berjejaring ini memecah kebuntuan komunikasi yang selama ini terjadi akibat ego sektoral institusi formal. Melalui wadah kolaborasi ini, modernisasi tidak lagi dipandang sebagai agenda pemaksaan dari luar, melainkan kebutuhan bersama untuk bertahan. Keberadaan ruang dialog yang inklusif ini memungkinkan setiap keluhan teknis dari pengurus koperasi dapat direspons cepat oleh pengembang. Model adaptasi kultural ini menjadi contoh nyata bagaimana modernitas dapat tumbuh subur tanpa harus mencabut akar tradisi.

Peran Strategis Pendampingan Berkelanjutan oleh Agen Digital Champion

Kunci utama dari keberlanjutan proses digitalisasi koperasi pedesaan terletak pada kehadiran figur pendamping lokal yang bertindak sebagai penggerak digital. Agen perubahan ini merupakan kelompok pemuda produktif dari internal desa yang secara khusus dilatih untuk menguasai sistem aplikasi keuangan. Pendekatan pemberdayaan mandiri ini selaras dengan prinsip inklusi digital berbasis komunitas yang diformulasikan secara teoritis oleh Philip et al. (2015). Berbeda dengan model pelatihan massal dari lembaga luar yang sering kali mandeg pascaprojek selesai, agen lokal menyediakan solusi instan. Keberadaan mereka di tengah masyarakat menumbuhkan rasa percaya diri bagi pengurus senior untuk bertanya tanpa merasa dihakimi. Hubungan sosial kekerabatan yang telah eksis menjadi modal utama untuk menjembatani kesenjangan pemahaman teknis yang dialami para lansia. Kehadiran pendamping yang siaga setiap saat di lingkungan desa meminimalkan risiko kemacetan operasional sistem informasi koperasi (Litasari & Al-Hanif, 2026; Medawati et al., 2020).



Secara teoritis, temuan ini memberikan implikasi kebijakan yang sangat mendasar bagi penyusunan program pemandirian ekonomi nasional di masa depan. Tingkat kecanggihan arsitektur teknologi bukanlah variabel tunggal yang menentukan kesuksesan adopsi inovasi pada lembaga keuangan mikro pedesaan. Faktor penentu yang sesungguhnya adalah tingkat kesesuaian desain platform dengan denyut nadi ekosistem sosial setempat serta konsistensi pendampingan. Pemerintah harus menggeser orientasi anggaran dari yang semula berfokus pada pengadaan perangkat keras menuju penguatan kapasitas manusia. Menciptakan ekosistem pendukung yang inklusif jauh lebih mendesak daripada sekadar memamerkan angka capaian unduhan aplikasi di toko digital. Melalui pelembagaan agen perubahan muda yang terdidik, koperasi pedesaan akan mampu bertransformasi menjadi pilar ekonomi modern yang mandiri. Langkah strategis ini akan mengukuhkan kedaulatan ekonomi digital nasional yang berakar kuat pada nilai kebersamaan sejati.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap kesenjangan spasial yang signifikan dalam implementasi kebijakan digitalisasi koperasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Capaian digitalisasi terkonsentrasi di wilayah Jawa dengan tingkat penetrasi jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia Timur, mencerminkan disparitas infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan konteks sosial budaya yang kompleks. Tiga bottleneck utama teridentifikasi: kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi pada kelompok usia lanjut, dan ketidaksesuaian desain platform dengan praktik ekonomi lokal berbasis gotong royong. Model tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, koperasi, dan penyedia teknologi lokal terbukti efektif dalam mengatasi bottleneck tersebut sebagaimana terdokumentasi dalam studi-studi kualitatif terkini. Keberhasilan transformasi digital koperasi pedesaan tidak bergantung pada transfer teknologi semata, tetapi pada kemampuan mengintegrasikan inovasi digital dengan nilai-nilai sosial budaya lokal melalui pendekatan co-design dan pendampingan berbasis komunitas.

Implikasi kebijakan yang direkomendasikan: (1) integrasi program digitalisasi koperasi dengan Prioritas Nasional 3: Penguatan Desa melalui alokasi anggaran untuk pendampingan berkelanjutan oleh digital champion tingkat desa; (2) pengembangan platform open-source yang memungkinkan adaptasi lokal oleh komunitas sesuai konteks sosial budaya; (3) insentif bagi koperasi yang berhasil meningkatkan literasi digital anggotanya melalui skema penghargaan atau akses pembiayaan preferensial. Keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan pada data sekunder—studi lanjutan perlu melibatkan observasi lapangan untuk memvalidasi temuan. Agenda riset masa depan perlu mengeksplorasi potensi artificial intelligence dalam memprediksi pola adopsi teknologi berdasarkan karakteristik sosial budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2023/02/27/statistik-indonesia-2023>
- Bunders, D. J., van der Velden, L., & Taekema, S. (2022). The feasibility of platform cooperatives in the gig economy. *Technological Forecasting and Social Change*, 176, 121441. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121441>
- Damayanti, S., Sutardi, A., Rahadi, R. A., Putri, A. M., Putri, A. N. A., & Hanifan, R. (2026). Convergent microfinance strategy: Combining fintech and conventional methods to



- enhance rural financial. *Qubahan Academic Journal*, 6(1), 29–46. <https://doi.org/10.48161/qaj.v6n1a2076>
- Darmayanti, N. E., & Maghfiroh, R. D. (2026). Kesiapan internal perusahaan dalam transformasi digital melalui implementasi ERP: Studi kasus PT Delta Jaya Mas berbasis kerangka TOE. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 339–348. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8880>
- Devi, S., Herawati, N. T., & Musmini, L. S. (2021). Sinergi lembaga perkreditan desa dalam mendukung financial inclusion. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 86–86. <https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.4403>
- Ha, H., Nguyen, T. T., & Tran, T. T. (2023). Digital economy in Southeast Asia: Challenges and opportunities. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 30(1), 5–27. <https://doi.org/10.1108/JABES-08-2022-0098>
- Haq, P., & Abdullah, A. (2026). Implikasi uang jampuk dalam keharmonisan rumah tangga. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(2), 762–773. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i2.9345>
- Hendrian, S. (2025). Transformasi digital dan keadilan sosial: Analisis dampaknya terhadap UMKM dan regulasi di Indonesia. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 1(11), 730–41. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v1i11.442>
- Jakobsen, K., Mikalsen, M., & Lilleng, G. (2023). A literature review of smart technology domains with implications for research on smart rural communities. *Technology in Society*, 75, 102397–102397. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102397>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2021). *Roadmap digitalisasi koperasi 2021–2024*. <https://kemenkopukm.go.id/roadmap-digitalisasi>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. (2023). *Laporan tahunan statistik koperasi Indonesia 2023*. <https://kemenkopukm.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). *Indonesia Emas 2045: Roadmap transformasi ekonomi inklusif*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Koswara, A. (2024). Digitalisasi ekonomi di pedesaan: Mengkaji kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(3), 180–180. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3407>
- Li, K., Liu, F., & Wang, Y. (2020). How should we understand the digital economy in Asia? *Electronic Commerce Research and Applications*, 41, 100949. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2020.100949>
- Litasari, L. N., & Al-Hanif, E. T. (2026). Dinamika kesadaran sosial keluarga dalam pendampingan lansia di Posyandu lansia Desa Klepu, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(2), 745–756. <https://doi.org/10.51878/social.v6i2.10461>
- Maharani, & Indratno, I. (2025). KomDesa: Inovasi digital partisipatif untuk perencanaan pembangunan desa cerdas. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/besurp.v5i2.19666>
- Manawar, A., Lukita, C., & Meria, L. (2023). The evolution of financial technology in Indonesia. *Startupreneur Business Digital (SABDA Journal)*, 2(2), 192–206. <https://doi.org/10.33050/sabda.v2i2.367>
- Medawati, R., Haryanto, J., & Ulfiana, E. (2020). Analisis faktor successful aging pada lansia yang bekerja sebagai petani. *Indonesian Journal of Community Health Nursing*, 5(1), 26–26. <https://doi.org/10.20473/ijchn.v5i1.18704>



- Ningsih, N. P. D. U. (2023). Relevansi sistem pengelolaan arsip digital dengan keamanan data di dunia pendidikan. *LAMPUHYANG*, 14(2), 1–10. <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v14i2.355>
- Nova, N., & González, R. A. (2022). A financial inclusion app and USSD service for farmers in rural Colombia. *Information Development*, 39(3), 581–599. <https://doi.org/10.1177/02666669221120050>
- Nurdany, A., Suryani, E., & Wijaya, A. (2021). Digitalization in Indonesian cooperatives: Current state and future direction. *Journal of Development Economics and Trade*, 4(2), 112–125. <https://doi.org/10.20473/jdet.v4i2.112-125>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Li, T., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Pelu, H., Rosmiati, R., Pelu, J., & Pelu, S. (2026). Penguatan kompetensi widyaiswara era digital berbasis manajemen talenta di Balai Diklat Keagamaan Makassar. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 6(1), 381–393. <https://doi.org/10.51878/social.v6i1.9725>
- Philip, L. J., Cottrill, C., Farrington, J., & Williams, F. (2015). Editorial: The rural digital economy. *Scottish Geographical Journal*, 131(3–4), 143–147. <https://doi.org/10.1080/14702541.2015.1083732>
- Putra, R., Bramasta, Aris, B., & Dwi, H. A. (2023). Penggunaan teknologi digital dalam kalangan usahawan luar bandar dalam era pandemik Covid-19. *Jurnal Pengurusan*, 67. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2023-67-12>
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Challenges of digital transformation in Indonesian cooperatives: A qualitative study. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 7(2), 156–170. <https://doi.org/10.25124/jisebi.v7i2.215>
- Suryono, R. R., Purwandari, B., & Budi, I. (2024). Cultural barriers in digital transformation of rural cooperatives: A qualitative study in Central Java. *Sustainability*, 16(5), 1892. <https://doi.org/10.3390/su16051892>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Wiguna, I. G. A., Paramitha, A. A. I. I., & Swastika, I. P. A. (2025). Perancangan UI/UX website teknologi tepat guna sebagai media penyebarluasan inovasi desa. *INFOTECH Journal*, 11(2), 312–317. <https://doi.org/10.31949/infotech.v11i2.15821>
- World Bank. (2021). *Beyond unicorns: Harnessing digital technologies for inclusion in Indonesia*. World Bank Publications. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099122103072245903/p175195>